

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desentralisasi dianggap sebagai sistem paling ampuh untuk diterapkan di Indonesia karena mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang tersekat oleh perairan. Sistem ini akan melahirkan bentuk-bentuk pemerintahan baru yang berada pada level wilayah yang lebih rendah, sebagai bagian urusan dan tanggung jawab daerah dapat dikelola dengan fokus dan sesuai potensi masing-masing daerah.

Ada tiga alasan pokok mengapa sistem desentralisasi diperlukan, pertama adalah *political equality*, terkait dengan alasan daerah sebagai peningkat kesetaraan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua *local accountability* yaitu terkait peningkatan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah, dan ketiga adalah *local responsiveness* yakni yang terkait dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah terhadap daerah masalah-masalah sosial-ekonomi yang terjadi di daerahnya. Dari ketiga unsur ini yang paling penting adalah bagaimana upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan sosial di daerah.<sup>1</sup>

Otonomi daerah muncul sebagai solusi dalam menangani masalah-masalah yang muncul akibat dari adanya sentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

---

<sup>1</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*, (Padang; Baduouse Media. 2008), hlm 230.

menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pelaksanaan dari otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 yang mana wewenang pengelolaan sistem pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa konsekuensi dari dijalankannya sistem otonomi daerah yaitu pemerintah daerah dituntut secara mandiri untuk mengelola keuangannya dengan berusaha menggali potensi fiskal yang dimiliki daerah tersebut dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya serta kemampuan ekonominya.

Suatu daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan atau kapasitas fiskal daerah, seperti sumberdaya alam, potensi daerah, keadaan alam dan kemampuan sumberdaya manusia tiap-tiap daerah. Hal itu menjadi sangat penting karena menentukan besarnya tingkat pendapatan suatu daerah. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah menjadikan tingkat pendapatan antar daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi fiskal yang dipunya. Adapun dampak lain dengan adanya otonomi daerah, terdapat kecenderungan masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

<sup>3</sup> Doni Mahardika, Rekhedi Priyo Santoso, "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011". *Journal Of Economics and Policy*. Vol. 6. No. 2, 2013, hlm 182-184

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada proses pembangunan dan menyangkut kesejahteraan dari masyarakat. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk juga dalam hal pembangunan.

Kesenjangan ekonomi daerah yang satu dengan daerah yang lainnya juga berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat kemakmuran antar daerah yang bersangkutan. Tambunan dalam bukunya perekonomian Indonesia: beberapa masalah penting, menyatakan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah sehingga tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakatnya sehingga relatif lebih makmur, sementara disisi lain daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga berakibat relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya.

Menurut Delis dkk, yang meneliti ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1990-2008 mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan proses pembangunan antar daerah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam aspek ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dellis, Arman., Roesmeli., dan Novita Sari. (n.d). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 4.No. 02. 2013.

Selain dilihat dari tingkat pertumbuhannya, dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi juga bisa dilihat dari segi pendapatan perkapita penduduk antar wilayah di Indonesia.<sup>5</sup>

Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. H. Joko Widodo mengumumkan 122 kabupaten tertinggal 2015-2019. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres itu ditandatangani pada 4 November 2015 lalu. Ke-122 kabupaten yang tertinggal yaitu :<sup>6</sup>

**Tabel 1.1. Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019**

<b>Provinsi dan Kabupaten</b>	
1. Provinsi (Prov) Aceh: - Kabupaten (Kab) Aceh Singkil	2. Prov Kalimantan Timur: - Kab Nunukan - Kab Mahakam Ulu
3. Prov Sumatera Utara: - Kab Nias - Kab Nias Selatan - Kab Nias Utara - Kab Nias Barat	4. Prov Sulawesi Tengah: - Kab Banggai Kepulauan - Kab Donggala - Kab Tolitoli - Kab Buol - Kab Parigi Moutong - Kab Tojo Una-Una - Kab Sigi - Kab Banggai Laut - Kab Morowali Utara

<sup>5</sup> Doni Mahardika, Rekhedi Priyo Santoso, "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011". *Journal Of Economics and Policy*. Vol. 6. No. 2, 2013, hlm 182-184.

<sup>6</sup> Detiknews, "Jokowi Tetapkan 122 Kabupaten ini Daerah Tertinggal 2015-2019", diakses dari <http://news.detik.com/berita/3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-2015-2019.html>, pada tanggal 08 November 2016 pukul 15.16.

<p>5. Prov Sumatera Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Kepulauan Mentawai</li> <li>- Kab Solok Selatan</li> <li>- Kab Pasaman Barat</li> </ul>	<p>6. Prov Sulawesi Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Jeneponto</li> </ul>
<p>7. Prov Sumatera Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Musi Rawas</li> <li>- Kab Musi Rawas Utara</li> </ul>	<p>8. Prov Sulawesi Tenggara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Konawe</li> <li>- Kab Bombana</li> <li>- Kab Konawe Kepulauan</li> </ul>
<p>9. Prov Bengkulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Seluma</li> </ul>	<p>10. Prov Gorontalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Boalemo</li> <li>- Kab Pohuwato</li> <li>- Kab Gorontalo Utara</li> </ul>
<p>11. Prov Lampung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Lampung Barat</li> <li>- Kab Pesisir Barat</li> </ul>	<p>12. Prov Sulawesi Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Polewali Mandar</li> <li>- Kab Mamuju Tengah</li> </ul>
<p>13. Prov Jawa Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Bondowoso</li> <li>- Kab Situbondo</li> <li>- Kab Bangkalan</li> <li>- Kab Sampang</li> </ul>	<p>14. Prov Maluku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Maluku Tenggara Barat</li> <li>- Kab Maluku Tengah</li> <li>- Kab Buru</li> <li>- Kab Kepulauan Aru</li> <li>- Kab Seram Bagian Barat</li> <li>- Kab Seram Bagian Timur</li> <li>- Kab Maluku Barat Daya</li> <li>- Kab Buru Selatan</li> </ul>
<p>15. Prov Banten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Pandeglang</li> <li>- Kab Lebak</li> </ul>	<p>16. Prov Maluku Utara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Halmahera Barat</li> <li>- Kab Kepulauan Sula</li> <li>- Kab Halmahera Selatan</li> <li>- Kab Halmahera Timur</li> <li>- Kab Pulau Morotai</li> </ul>
<p>17. Prov NTB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Lombok Barat</li> <li>- Kab Lombok Tengah</li> <li>- Kab Lombok Timur</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Sumbawa</li> <li>- Kab Dompu</li> <li>- Kab Bima</li> <li>- Kab Sumbawa Barat</li> <li>- Kab Lombok Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Pulau Taliabu</li> </ul>
<p>19. Prov NTT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Sumba Barat</li> <li>- Kab Sumba Timur</li> <li>- Kab Kupang</li> <li>- Kab Timor Tengah Selatan</li> <li>- Kab Timor Tengah Utara</li> <li>- Kab Belu</li> <li>- Kab Alor</li> <li>- Kab Lembata</li> <li>- Kab Ende</li> <li>- Kab Manggarai</li> <li>- Kab Rote Ndao</li> <li>- Kab Manggarai Barat</li> <li>- Kab Sumba Tengah</li> <li>- Kab Sumba Barat Daya</li> <li>- Kab Nagekeo</li> <li>- Kab Manggarai Timur</li> <li>- Kab Sabu Raijua</li> <li>- Kab Malaka</li> </ul>	<p>18. Prov Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Teluk Wondama</li> <li>- Kab Teluk Bintuni</li> <li>- Kab Sorong Selatan</li> <li>- Kab Sorong</li> <li>- Kab Raja Ampat</li> <li>- Kab Tambrauw</li> <li>- Kab Maybrat</li> </ul>
<p>21. Prov Kalimantan Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Sambas</li> <li>- Kab Bengkayang</li> <li>- Kab Landak</li> <li>- Kab Ketapang</li> <li>- Kab Sintang</li> </ul>	<p>20. Prov Papua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab Merauke</li> <li>- Kab Jayawijaya</li> <li>- Kab Nabire</li> <li>- Kab Kepulauan Yapen</li> <li>- Kab Biak Numfor</li> <li>- Kab Paniai</li> <li>- Kab Puncak Jaya</li> <li>- Kab Boven Digoel</li> <li>- Kab Mappi</li> <li>- Kab Asmat</li> <li>- Kab Yahukimo</li> <li>- Kab Pegunungan Bintang</li> <li>- Kab Tolikara</li> <li>- Kab Sarmi</li> <li>- Kab Keerom</li> <li>- Kab Waropen</li> <li>- Kab Supiori</li> <li>- Kab Memberamo Raya</li> <li>- Kab Nduga</li> <li>- Kab Lanny Jaya</li> </ul>

- Kab Kapuas Hulu - Kab Melawi - Kab Kayong Utara	- Kab Memberamo Tengah - Kab Yalimo - Kab Dogiyai
22. Prov Kalimantan Tengah: - Kab Seruyan	- Kab Intan Jaya - Kab Deiyai.
23. Prov Kalimantan Selatan: - Kab Hulu Sungai Utara	

Sumber : Perpres No. 131/2015 Tentang Daerah Tertinggal (diolah)

Dengan melihat data diatas Provinsi Papua adalah provinsi yang menyumbang angka daerah tertinggal terbanyak, dari 29 kabupaten dan kota 25 daerah yang dinyatakan tertinggal dan 4 daerah lainnya dinyatakan maju atau hanya 14 persen.

**Tabel 1. 2. Kabupaten Tertinggal 2015-2019 di Provinsi Papua**

No	Kabupaten/Kota	Tertinggal	Maju
1.	Kabupaten Merauke	√	
2.	Kabupaten Jayawijaya	√	
3.	Kabupaten Jayapura		√
4.	Kabupaten Nabire	√	
5.	Kabupaten Kepulauan Yapen	√	
6.	Kabupaten Biak Numfor	√	
7.	Kabupaten Puncak Jaya	√	
8.	Kabupaten Paniai	√	
9.	Kabupaten Mimika		√
10.	Kabupaten Sarmi	√	
11.	Kabupaten Keerom	√	
12.	Kabupaten Pegunungan Bintang	√	
13.	Kabupaten Yahukimo	√	
14.	Kabupaten Tolikara	√	
15.	Kabupaten Waropen	√	
16.	Kabupaten Boven Digoel	√	

17.	Kabupaten Mappi	√	
18.	Kabupaten Asmat	√	
19.	Kabupaten Supiori	√	
20.	Kabupaten Mamberamo Raya	√	
21.	Kabupaten Mamberamo Tengah	√	
22.	Kabupaten Yalimo	√	
23.	Kabupaten Lanny Jaya	√	
24.	Kabupaten Nduga	√	
25.	Kabupaten Puncak		√
26.	Kabupaten Dogiyai	√	
27.	Kabupaten Intan Jaya	√	
28.	Kabupaten Deiyai	√	
29.	Kota Jayapura		√

Sumber : Perpres No. 131/2015 Tentang Daerah Tertinggal (diolah)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Doni Mahardiki dan Rokhedi Priyo Santoso membahas tentang analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia 2006-2011, mengelompokkan laju pertumbuhan PDRB per kapita menurut pulau.

**Tabel 1.3. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Pulau Tahun 2006 Dan 2011**

No	Pulau	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (persen)	
		2006	2011
1.	Sumatra	4,7	4,84
2.	Jawa	4,25	5,49
3.	Bali dan Nusa Tenggara	2,73	1,69
4.	Kalimantan	5,30	5,99
5.	Sulawesi	5,28	7,05
6.	Maluku dan Papua	-1,44	1,29

Sumber: BPS Indonesia, 2006 dan 2011 (diolah)

Mereka menjelaskan pada tahun 2006, rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita dari masing-masing pulau sudah mulai naik dan hanya terdapat beberapa pulau yang rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapitanya masih rendah, yaitu Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapitanya sebesar 2,73% serta Maluku dan Papua yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita hanya sebesar -1,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua sangat rendah.<sup>7</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan Ida Ayu Purba Riani dkk, memaparkan dengan jelas bagaimana tanah Papua yang terbentang dari Provinsi Papua hingga Provinsi Papua Barat, menjadi salah satu kawasan dengan keunggulan sumber kekayaan alam terbesar dan terkaya di dunia. Hal itu ditunjukkan adanya cadangan emas dan tembaga yang dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia merupakan salah satu cadangan terbesar didunia. Pada tahun 2004 misalnya, Freeport mampu menyetor pajak ke Pemerintah Indonesia sebanyak Rp 2,4 triliun, kemudian pada tahun 2005 naik empat kali lipat menjadi sekitar Rp. 10 triliun. Selain emas dan tembaga juga memiliki tambang minyak bumi yang dieksploitasi oleh berbagai perusahaan baik nasional maupun multinasional. Di antaranya Shell, Amoseas, Conoco Philips dan Total Indonesia. Milyaran dollar AS telah dihasilkan dari kegiatan eksploitasi tambang minyak tersebut. Di samping itu sumberdaya alam yang sangat potensial di antaranya: hasil perkebunan, perikanan, kehutanan dan lain-lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Doni Mahardiki, *Analisis Perubahan*. hlm. 181-182

<sup>8</sup> Ida Ayu Purba Riani, M. Pudjihardj., *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pendapatan Per Kapita Kemiskinan dan Ketimpangan Antarwilayah di Provinsi Papua*. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No. 1, Februari 2012, hlm. 137 - 148

Berdasarkan profil sumberdaya alam di atas, dapat dikatakan bahwa provinsi Papua memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah dan sangat besar potensinya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan pemanfaatan sumberdaya alam ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sendiri.

Hal ini ditunjukkan oleh kehidupan masyarakatnya yang miskin, dan selalu masuk dalam katagori provinsi miskin di Indonesia. Pada tahun 1991 misalnya Papua berada pada urutan kelima dalam klasifikasi provinsi termiskin di Indonesia. Selanjutnya hasil sensus BPS tahun 1993 kembali menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua terjadi merata hampir di semua wilayah kabupaten yang meliputi sekitar 79 persen dari 2.195 desa yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua.<sup>9</sup>

Kebanyakan tempat tinggalnya di daerah-daerah pedalaman, lembah-lembah gunung dan lereng-lereng gunung, yang sangat tergantung dengan kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional seperti berburu, meramu, menanam sagu dan menangkap ikan di sungai. Pola kegiatan ekonominya lebih bersifat subsistence yang sudah jelas tidak akan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Jumlah penduduk yang terisolir dari aktifitas perekonomian modern ini di perkirakan sekitar 80% dari total penduduk Papua. Hidup mereka masih terbelakang, khususnya dalam hal pertanian, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguasaan IPTEK.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pemekaran wilayah yang dilakukan selama ini di Papua sepertinya juga mengakibatkan semakin bertambahnya kantong-kantong kemiskinan yang baru. Pada saat awal masa pemekaran wilayah tersebut, tahun 2003, belum begitu banyak terlihat kantong-kantong kemiskinan yang kronis (di atas 40%). Kemiskinan hanya tersebar pada 6 kabupaten saja yakni Jayapura, Manokwari, Paniai, Biak Numfor, Yapen Waropen dan Nabire, dengan rata-rata sekitar 49.76%. Namun setelah dilakukan pemekaran, keadaan di tahun 2009 menunjukkan jumlah kantong kemiskinan bertambah menjadi 10 kabupaten yang meliputi Kabupaten Supiori, Paniai, Kota Jayapura, Jayawijaya, Yahukimo, Biak Numfor, Waropen, Nabire, Tolikara dan Yapen Waropen, dimana secara merata masing-masing kabupaten tersebut mempunyai tingkat kemiskinan kurang lebih sekitar 48,45%. Secara keseluruhan, ada kecenderungan bahwa sepanjang pelaksanaan pemekaran daerah jumlah penduduk miskin di Papua tidak banyak berubah dari tahun ke tahunnya berkisar diantara 37%, dan tetap paling tinggi di seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

Melihat hal tersebut perlu penanganan yang serius, paling tidak sebagai langkah awal perlu dilakukan tinjauan kembali teori-teori dan seluruh tatanan ekonomi yang ada. Selanjutnya dianalisis secara objektif dalam rangka menemukan pendekatan alternatif yang segar untuk suatu tujuan efisiensi dan keadilan bagi semua.

Islam sebagai agama *rahmah lil 'alamin* mencakup ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, yang dapat menyelamatkan manusia dan alam

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

semesta dari kehancuran. Karena itu, Islam menawarkan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan hidup yang bersifat manusiawi dan universal itu kepada dunia modern dan diharapkan mampu memberikan alternatif-alternatif pemecahan terhadap berbagai problematika hidup manusia.

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). hlm. 216.

Ketimpangan dan penyimpangan distribusi barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan, dan akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. Beberapa kasus penyimpangan distribusi, seperti kelangkaan minyak tanah di beberapa provinsi, termasuk Jakarta, ternyata disinyalir sebagai akibat terjadinya penyimpangan distribusi. Hal ini akan berdampak pada langkanya barang-barang produksi sehingga harga barang di pasaran melambung tinggi, bahkan banyak juga warga masyarakat yang kekurangan pangan dan kelaparan.<sup>12</sup>

Berangkat dari dasar pemikiran dan realitas tersebut di atas, Islam sebagai agama yang *rahmah lil 'alamin* diharapkan mampu memberikan alternatif-alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka aktual dan menarik untuk diangkat sebagai tesis dengan judul, “*Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2011-2015 telaah Ekonomi Islam*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2011-2015?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Papua?

---

<sup>12</sup> Liputan6, “*Minyak Tanah dan Solar Langka di Jakarta*”, diakses dari <https://m.liputan6.com/amp/10696/minyak-tanah-dan-solar-langka-di-jakarta.htm>, pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 20.10.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

- a. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kesenjangan ekonomi yang ada di Papua selama priode 2011-2015.
- b. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji, dan menganalisis pandangan ekonomi Islam tentang kesenjangan ekonomi di Papua dengan konsep ekonomi yang berkeadilan mengacu pada ajaran Islami.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan serca kajian tentang pemikiran pembangunan berkeadilan yang Islami, khususnya pada bidang pertumbuhan ekonomi dan konsep Islam dalam memeratakan pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan kajian tentang kesenjangan ekonomi serta padangan Islam mengenai hal tersebut.

#### **b. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengalaman bagi lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua, serta bagi daerah lainnya

khususnya tentang kesenjangan ekonomi, serta kajian ekonomi Islam mengenai pembahasan tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari proposal tesis yang berjudul " Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2011-2015 telaah Ekonomi Islam" maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang yang melandasi lahirnya penelitian terhadap permasalahan dalam proposal tesis ini. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diteliti dalam tesis ini meliputi 2 (dua) hal yakni bagaimana kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2011-2015 dan bagaimana konsep ekonomi Islam melihat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Papua. Disamping latar belakang dan rumusan masalah, pada bab I juga diuraikan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis yang dipakai mengkaji sesuai permasalahan yang dibahas.

Bab II tentang tinjauan umum kesenjangan ekonomi, yang merupakan pengembangan dan kajian teoritis pada bab I. Pembahasan pada bab ini dibedakan dalam beberapa sub bab, yakni teori konsep ekonomi Islam, teori pertumbuhan pembangunan wilayah, disparitas pendapatan, faktor-faktor penyebab disparitas pendapatan, efek disparitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kedudukan dan fungsi kabupaten/kota dalam pertumbuhan ekonomi, strategi ekonomi pembangunan dalam Islam dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Bab III tentang pembahasan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, data-data yang menunjang pembahasan permasalahan, teknik pengumpulan bahan data serta teknik pengolahan dan analisa bahan data.

Bab IV mengupas tentang permasalahan yang diangkat pada tesis ini yaitu bagaimana kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota Papua 2011-2015 dan bagaimana konsep ekonomi berkeadilan dalam Islam melihat kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Bab V ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang ada pada bab IV, yang diolah sehingga menjadi inti dari penelitian. Tak lupa saran dari penulis juga di tuangkan pada bab ini.

